

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

Ghonimah Zumroatun Ainiyah  
STIE TamansiswaBanjarnegara  
[eny.wsb@gmail.com](mailto:eny.wsb@gmail.com)

Yogka Arief Pratama  
STIE TamansiswaBanjarnegara  
[yogkamathias@gmail.com](mailto:yogkamathias@gmail.com)

Enjang Pradikha  
STIE TamansiswaBanjarnegara  
[enjangpdk@gmail.com](mailto:enjangpdk@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The problems in this study are <sup>(1)</sup> Local Own Revenue (PAD) after the transfer by the management of the Land and Building Tax on Rural and Urban (PBB-P2) to a rapidly increasing Local Tax. <sup>(2)</sup> Local Own Revenue (PAD) within 5 (five) years always increases both before and after the transfer of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) to Regional Tax. This study aims to determine the level of efficiency, effectiveness, and confusion of PBB-P2 to PAD Banjarnegara Regency. This type of research is quantitative with descriptive studies or called quantitative descriptive. The data used in this study are primary and secondary data. The subject of this research is the Regional Revenue, Financial Management and Asset Agency (BPPKAD) of Banjarnegara Regency. While the object of this research is the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). Data analysis in this research uses interpretation scale. The results of this study indicate that the level of efficiency of PBB-P2 acceptance of Banjarnegara Regency in 2014-2018 as a whole shows the criterion value of interpretation is very efficient, with an average of 2%. The level of effectiveness of PBB-P2 acceptance of Banjarnegara Regency in 2014-2018 as a whole shows the criteria of interpretation values are very effective, with an average of 108%. The contribution of PBB-P2 receipts to the PAD of Banjarnegara Regency in 2014-2018 shows that the criteria for interpretation are very poor, with an average of 9%.*

*Keywords: Efficiency, Effectiveness, Contributions, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), Local Revenue (PAD).*

**PENDAHULUAN**

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut

kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2017).

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi

daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan sektor PBB-P2 akan masuk kedalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat (Saputro, 2017).

Pengalihan PBB-P2 tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan PBB-P2 hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2. Setelah pengelolaan PBB dari sektor P2 di Surabaya pada tahun 2011 dilaksanakan, di tahun 2012 menyusul ada tujuh belas kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2, dan ditahun 2013 ada seratus lima kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2017).

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menerapkan PBB-P2 sebagai salah satu pajak daerah sejak 1 Januari 2014 yang seharusnya sudah diterapkan PBB-P2 dari 2013. Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara me-realisis pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang semula dipungut oleh pemerintah pusat. Hal itu dilakukan untuk menindak-lanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri PBB-P2.

Adapun target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara periode sebelum pengalihan PBB-P2 tahun 2009-2013 dan setelah pengalihan PBB-P2 tahun 2014-2018 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1**

Pendapatan Asli Daerah Kab. Banjarnegara Sebelum Pengalihan PBB-P2 Tahun 2009-2013 dan Setelah Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014-2018:

Sebelum Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah		
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	59.012.519.000,0	60.636.814.797,0
2010	61.741.597.000,0	62.486.768.063,0
2011	63.080.232.000,0	71.107.053.223,0
2012	77.716.593.000,0	94.271.467.989,0
2013	88.557.495.000,0	98.975.318.350,0
Setelah Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah		
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	127.171.027.100,0	161.652.537.773,0
2015	142.628.201.000,0	180.561.068.549,0
2016	194.124.474.100,0	221.048.387.512,0
2017	277.400.917.500,0	297.485.382.003,0
2018	218.725.264.000,0	235.994.437.000,0

Sumber Data: BPPKAD Kab. Banjarnegara, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa target PAD Kabupaten Banjarnegara sebelum pengalihan tahun 2009-2013 dan setelah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah tahun 2014-2018 sudah terealisasi dengan baik. Dari tahun 2009-2013 terjadi kenaikan PAD secara signifikan tetapi kecil/rendah, sedangkan setelah ada pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah kenaikan PAD sangat signifikan dengan angka yang cukup besar/ tinggi. Namun target dan realisasi PAD di tahun 2018 mengalami penurunan.

Hal ini yang menjadi motivasi bagi Penulis untuk mengetahui: (1) PAD setelah pengalihan dengan dikelolanya

PBB-P2 menjadi pajak daerah mengalami kenaikan yang sangat besar. (2) PAD dalam kurun waktu lima tahun selalu mengalami kenaikan baik sebelum maupun setelah adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Masitoh (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi PBB-P2 di Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 sangat efisien, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 sangat efektif, dan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 sangat kurang.

Hasil berbeda dalam penelitian yang dilakukan Galih Wicaksono dan Tri Setiawan Pamungkas (2017) bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember tahun 2013-2015 kurang efektif, tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Jember tahun 2013-2015 sangat kurang.

Pajak daerah salah satunya adalah PBB-P2 merupakan salah satu PAD. Tahun 2014 merupakan tahun pertama pajak PBB-P2 dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar tingkat efisiensi PBB-P2, tingkat efektivitas PBB-P2 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD. Untuk itu perlu adanya pengukuran kinerja untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan (Nordiawan dan Hertianti, 2016).

Kontribusi PBB-P2 merupakan bagian dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Pengukuran kinerja BPPKAD perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian, yang bermanfaat untuk BPPKAD di masa mendatang. Mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memperhitungkan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Selain itu, memperhitungkan kontribusi suatu komponen pendapatan terhadap total pendapatan juga perlu dilakukan untuk melihat proporsinya terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima organisasi dengan menggunakan indikator. Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar dari pada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat efisiensi dari pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk BPPKAD dalam proses pemungutan PBB-P2 dilihat dari berbagai faktor.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) memiliki keterkaitan dengan pembayaran pajak (Simarmata, 2012). Dalam teori sinyal, pihak manajer berpandangan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dalam menghasilkan informasi laba setelah pajak yang tinggi diharapkan dapat memberikan sinyal positif yang akan meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut dalam Hanlon et al (2009) praktik penghindaran pajak dapat dinilai sebagai sinyal positif maupun negatif. Hasil penelitian Hanlon et al (2009), membuktikan bahwa penghindaran pajak dipandang positif jika dipandang sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak dan efisiensi pajak dan resiko deteksinya kecil, tetapi penghindaran pajak dipandang negatif karena dipandang adanya ketidakpatuhan dan tindakan

tersebut beresiko deteksi besar yang akan menimbulkan biaya tinggi nantinya sehingga nilai perusahaan menurun.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD adalah semua penerimaan daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sah (Mahsun, 2018; Halim, 2018).

### **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan usaha tertentu lainnya dipungut oleh pemerintah pusat.

Objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mekanisme PBB-P2 dilakukan dengan pendataan terhadap objek pajak PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

### **Efisiensi**

Secara umum, efisiensi adalah suatu ukuran kegiatan atau proses yang dapat dinilai dengan membandingkan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan berupa sumber daya yang dimiliki dan keluaran yang dihasilkan oleh organisasi (Mardiasmo, 2018).

Tingkat efisiensi diukur dengan rasio. Rasio efisiensi adalah rasio yang membandingkan antara masukan berupa biaya dengan keluaran berupa pendapatan yang diterima (Halim, 2018).

### **Efektivitas**

Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Secara umum, efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) dalam mencapai tujuannya.

### **Kontribusi**

Pada penelitian ini, kontribusi diartikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap PAD. Artinya, semakin besar sumbangan yang diberikan maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan, begitu pula sebaliknya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.03, Krandegan, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah 53474, Tlp. (0286) 591081, E-mail [bppkad@banjarnegarakab.go.id](mailto:bppkad@banjarnegarakab.go.id).

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif.

### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah efisiensi, efektifitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banjarnegara.

### Definisi Konsep dan Operasional Variabel

#### 1. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaannya telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya *input* minimal dapat diperoleh hasil *output* yang diinginkan.

#### 2. Efektivitas

Efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan PBB-P2 dengan potensi atau target penerimaan PBB-P2 yang telah dilakukan di Kabupaten Banjarnegara. Efektif atau tidaknya pungutan PBB-P2 akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

#### 3. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya PBB-P2) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu.

## Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan langsung di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.

Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data biaya pemungutan atau biaya operasional pemungutan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018, data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018, serta laporan target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018.

### Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Tingkat Efisiensi PBB-P2

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menghitung tingkat efisiensi dengan menggunakan rumus:

$$\text{PBB-P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

- b. Menjelaskan hasil perhitungan efisiensi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014-2018 dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan skala interpretasi nilai efisiensi. Untuk menilai tingkat efisiensi, maka dapat dilihat pada **tabel 2** berikut:

**Tabel 2**

Interpretasi Nilai Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-10	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang Efisien
>30	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, 2016

- c. Menganalisis hasil perhitungan efisiensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan nilai interpretasi efisiensi dengan studi deskriptif.

**2. Analisis Tingkat Efektivitas PBB-P2**

Menghitung tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama, yaitu:

- a. Menghitung tingkat efektivitas dengan menggunakan rumus:
- $$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

- b. Untuk menilai tingkat efektivitas, maka dapat dilihat pada **tabel 3** berikut:

**Tabel 3**

Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2016

- c. Melakukan analisis diskriptif atas hasil perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan nilai interpretasi efektivitas.

**3. Analisis Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD**

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menghitung kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, maka dapat dilihat pada **tabel 4** berikut:

**Tabel 4**

Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Masitoh, 2018

- c. Melakukan analisis diskriptif atas hasil perhitungan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Efisiensi PBB-P2 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018**

**Tabel 5**

Efisiensi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2014-2018

Tahun	Biaya Pemungutan PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2014	Rp.240.000.000	Rp.16.358.407.332	1%	Sangat Efisiensi
2015	Rp.400.000.000	Rp.17.999.984.017	2%	Sangat Efisiensi
2016	Rp.400.000.000	Rp.18.274.153.151	2%	Sangat Efisiensi
2017	Rp.400.000.000	Rp.19.148.458.842	2%	Sangat Efisiensi
2018	Rp.400.000.000	Rp.22.338.520.114	2%	Sangat Efisiensi
	<b>Rata-rata</b>		<b>2%</b>	<b>Sangat Efisiensi</b>

Sumber Data: BPPKAD Kab. Banjarnegara, 2020

**2. Efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018**

**Tabel 6**

Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Tahun 2014-2018

Tahun	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2014	Rp.14.500.000.000	Rp.16.358.407.332	113%	Sangat Efektif
2015	Rp.17.000.000.000	Rp.17.999.984.017	106%	Sangat Efektif
2016	Rp.17.700.000.000	Rp.18.274.153.151	103%	Sangat Efektif
2017	Rp.18.450.000.000	Rp.19.148.458.842	104%	Sangat Efektif
2018	Rp.19.926.000.000	Rp.22.338.520.114	112%	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>		<b>108%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber Data: BPPKAD Kab. Banjarnegara, 2020

### 3. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018

Tabel 7

Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Kriteria
2014	Rp.16.358.407.332	Rp.161.652.537.773	10%	Sangat Kurang
2015	Rp.17.999.984.017	Rp.180.561.068.549	10%	Sangat Kurang
2016	Rp.18.274.153.151	Rp.221.048.387.512	8%	Sangat Kurang
2017	Rp.19.148.458.842	Rp.297.485.382.003	6%	Sangat Kurang
2018	Rp.22.338.520.114	Rp.235.994.437.000	9%	Sangat Kurang
Rata-rata			9%	Sangat Kurang

Sumber Data: BPPKAD Kab. Banjarnegara, 2020

#### Pembahasan

##### 1. Analisis Efisiensi PBB-P2 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel 5, tingkat efisiensi paling tinggi terjadi pada tahun 2014, hal ini dikarenakan biaya pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp.240.000.000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.16.358.407.332 yang dapat memenuhi target PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp.14.500.000.000, dan tingkat efisiensi PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 1% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien.

Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2014, hal ini dikarenakan biaya pemungutan PBB-P2 pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.160.000.000.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar Rp.274.169.134 dibandingkan dengan tahun 2015, namun tingkat efisiensi PBB-P2 tahun 2016 memperoleh presentase yang sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 2% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Hal ini dikarenakan target PBB-P2 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.700.000.000.

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar Rp.874.305.691 dibandingkan dengan tahun 2016, namun tingkat efisiensi PBB-P2 tahun 2017 memperoleh presentase yang sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 2% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Hal ini dikarenakan target PBB-P2 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.750.000.000.

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.190.061.272 dibandingkan dengan tahun 2017, namun tingkat efisiensi PBB-P2 tahun 2018 memperoleh presentase yang sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 2% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Hal ini dikarenakan target PBB-P2 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.1.476.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bidang PBB-P2 di Kantor BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, dari tahun 2014-2018 Penerimaan PBB-P2 selalu meningkat dan dapat melebihi target, namun tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan presentase sebesar 1% dan memperoleh kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Pada tahun 2015 merupakan tingkat efisiensi terendah dengan presentase sebesar 2% dan memperoleh kriteria sangat efisien.

Meskipun penerimaan PBB-P2 pada tahun 2015 meningkat namun tingkat efisiensi menurun, hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya pemungutan (SPPT) dibandingkan tahun 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan tingkat efisiensi PBB-P2 dari tahun 2014-2018 menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 2%. Hasil perhitungan dari data yang diperoleh bisa dikatakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupa-

ten Banjarnegara dari tahun 2014-2018 telah optimal dan baik dalam memanfaatkan biaya pemungutan sehingga semakin efisien organisasi itu berjalan.

Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Masitoh (2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata sebesar 4,62%.

Menurut Penulis Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah sebelas pajak seharusnya dalam menyajikan laporan keuangan yang didalamnya terdapat biaya operasional pemungutan dibuat per masing-masing jenis pajak secara rinci, sehingga memudahkan untuk diketahui besaran biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis pajak khususnya PBB-P2. Jika diketahui seluruh biaya operasional pemungutan PBB-P2 maka akan diketahui total biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan PBB-P2.

## 2. Analisis Efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018

Berdasarkan **tabel 6**, pada tahun 2014 merupakan tingkat efektivitas PBB-P2 tertinggi, hal ini dikarenakan target PBB-P2 pada tahun 2014 masih rendah yaitu sebesar Rp.14.500.000.000 sedangkan realisasi penerimaan PBB-P2 yang dapat melebihi target yaitu sebesar Rp. 16.358.407.332 dan tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 113% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif.

Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 7%, hal ini dikarenakan kenai-

kan target sebesar Rp.2.500.000.000 dan realisasi penerimaan PBB-P2 juga mengalami kenaikan yang kecil yaitu sebesar Rp.1.641.576.685 dibandingkan dengan tahun 2014.

Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3%, hal ini dikarenakan kenaikan target sebesar Rp.700.000.000 dan realisasi penerimaan PBB-P2 juga mengalami kenaikan yang sangat kecil yaitu sebesar Rp.274.169.134 dibandingkan dengan tahun 2014-2018.

Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1%, hal ini dikarenakan kenaikan target sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi penerimaan PBB-P2 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.874.305.691 dibandingkan dengan tahun 2016.

Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8%, hal ini dikarenakan kenaikan target sebesar Rp.1.476.000.000 dan realisasi penerimaan PBB-P2 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.3.190.061.272 dibandingkan dengan tahun 2017.

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektif atau tidaknya pungutan PBB-P2 yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Jadi, efektivitas merupakan ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bidang PBB-P2 di Kantor BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, dari tahun 2014-2018 tingkat efektivitas setiap tahunnya meningkat kecuali tahun 2015 dan

2016 hal ini disebabkan kenaikan target PBB-P2 yang begitu besar dengan realisasi penerimaan PBB-P2 juga mengalami kenaikan tetapi sangat kecil, namun masih memenuhi target. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif dengan rata-rata sebesar 108%, Hal tersebut menjadikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan sudah maksimal dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dikatakan bisa berprestasi karena melampaui target yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Masitoh (2018). Secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 110,46%.

### 3. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018

Berdasarkan **tabel 7**, data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun dari tahun 2014-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 9%.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Masitoh (2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata sebesar 9,97%.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dari tahun 2014-2018

kontribusi PBB-P2 terhadap PAD setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap PAD masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bidang PBB-P2 di Kantor BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, tingkat kontribusi yang semakin menurun setiap tahunnya ini dikarenakan realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya dengan angka realisasi yang cukup besar, akan tetapi realisasi PBB-P2 masih sangat kecil. Kontribusi yang diterima masih kurang karena pertumbuhan penerimaan PAD lebih besar di-bandingkan dengan pertumbuhan PBB-P2.

Namun secara keseluruhan jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan dari PBB-P2 saja, karena komponen pendapatan asli daerah juga berasal dari pajak daerah yang lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjarnegara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi pendapatan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata sebesar 2% yang berarti bahwa Kabupaten Banjarnegara telah baik dan optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan, sehingga lembaga

BPPKAD semakin efisien dalam menjalankan tugasnya.

2. Tingkat efektivitas pendapatan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 108% yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah berhasil mencapai tujuan dalam penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara sehingga dikatakan telah berjalan dengan sangat efektif.
3. Kontribusi pendapatan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata sebesar 9%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap PAD masih sangat kurang. Tingkat kontribusi semakin menurun setiap tahunnya, hal ini dikarenakan realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya dengan angka realisasi yang cukup besar, akan tetapi realisasi PBB-P2 masih sangat kecil. Kontribusi yang diterima masih sangat kurang, pertumbuhan penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan PBB-P2.

#### **Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dari hasil pemungutan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018 telah dilakukan dengan efektif dan efisien. Namun kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap PAD masih kurang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Banjarnegara perlu menyusun strategi dan perencanaan untuk

mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arditia, Reza. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Surabaya: *Universitas Negeri Surabaya*.
- Amalia Sari, Kinanti. (2017). Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember). Jember: *Universitas Jember*.
- Abuyamin, Oyok. (2013). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BPPKAD. (2019). *Profil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. [www.bppkad.banjarnegarakab.go.id](http://www.bppkad.banjarnegarakab.go.id). Diakses pada tanggal 15 Januari 2020.
- Direktorat Jendral Pajak. (2011). *Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- Darmawan, Deni. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Halim, Abdul. (2010). *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Semarang: *Universitas Negeri Semarang*.
- Lubis, Putri Kemala Dewi dan Fitriany Saragih. (2017). *An Effectiveness Analysis of Land and Building Tax Revenue of the Regional Revenue Office of Medan*. Medan: *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Masitoh, Siti. (2018). Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas). Purwokerto: *IAIN Purwokerto*.
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertianti. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ningsih, Endang Kusdiah. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Palembang: *Fakultas Ekonomi Universitas IBA*.
- Nisa, Sofiatun dan Yozi Aulia Rahman. (2019). *Study of the Collection and Potency of Rural and Urban Land and Building Tax*. O Polli, Sumena. (2017). Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado. Manado: *Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Utiahman, Nur Riza dkk. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. Manado: *Universitas Sam Ratulangi*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suliyanto. (2011). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Saputro, Rudi dkk. (2017). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Surabaya: *Universitas Brawijaya*.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi: Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wiratna, Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Wardani, Raudhatun dan Wida Fadhlia. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No.3, [www.jim.unsyiah.ac.id](http://www.jim.unsyiah.ac.id).

Wicaksono, Galih & Tree Setiawan Pamungkas. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Universitas Jember: *Jurnal STIE Semarang VOL 9*

No. 1 Edisi Februari 2017 (ISSN : 2085-5656), [www.repository.unej.ac.id](http://www.repository.unej.ac.id).

Widyayana, Santi. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013-2016. Universitas Nusantara PGRI Kediri: *Simki-Economic Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN: BBBB-BBBB*, [www.simki.unpkediri.ac.id](http://www.simki.unpkediri.ac.id).

Yuniawati, Veny dkk. (2016). *Gap Analysis (Tax Gap) Land and Building Tax of Urban and Rural Sector (PBB-P2) Revenues in Kediri City*. Kediri: Universitas Brawijaya.